

FAKTOR PENDORONG TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN PARIS

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

TISKA DWI PUTRI

2010851005



Dosen Pembimbing

Anita Afriani Sinulingga, S.IP., M.Si

Silvi Cory, S.Pd., M.Si

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Pada tahun 2016, Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris meskipun sebelumnya belum bersedia membuat komitmen konkret terkait perubahan iklim karena kekhawatiran akan menghambat pertumbuhan ekonominya yang bergantung pada energi fosil. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri lingkungan oleh Paul G. Harris, khususnya pendekatan berbasis kognitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Analisis difokuskan pada tiga tingkatan: sistemik, masyarakat, dan negara, dengan menekankan bagaimana ide dan pemahaman para aktor kunci di berbagai tingkatan memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Di tingkat sistemik, komunitas epistemik membentuk narasi tentang dampak negatif perubahan iklim. Tiongkok juga menghadapi tekanan internasional, perubahan norma iklim global, serta tuntutan untuk bertindak sebagai negara besar yang bertanggung jawab. Di tingkat masyarakat, gagasan kelompok bisnis energi terbarukan mendorong kebijakan yang mengintegrasikan peradaban ekologi, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keamanan energi. Di tingkat negara, keputusan untuk meratifikasi dipengaruhi oleh ide dan gagasan para ahli serta akademisi yang mendorong kebijakan berbasis penelitian ilmiah, sehingga selaras dengan citra Tiongkok sebagai pemimpin global dalam menghadapi perubahan iklim.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Kognitivisme, Perjanjian Paris, Tiongkok



ABSTRACT

In 2016, China ratified the Paris Agreement, despite previously being reluctant to make concrete climate commitments due to concerns that it could hinder its economic growth, which heavily relies on fossil fuels. This study aims to analyze the factors that drove China to ratify the Paris Agreement using Paul G. Harris's environmental foreign policy analysis framework, specifically the cognitive-based approach. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, using literature review as the data collection technique. The analysis is focused on three levels: systemic, societal, and state, emphasizing how the ideas and understanding of key actors at each level influence foreign policy decision-making. At the systemic level, the epistemic community shapes the narrative about the negative impacts of climate change. China also faces international pressure, shifting global climate norms, and demands to act as a responsible major power. At the societal level, the ideas of renewable energy business groups promote policies that integrate ecological civilization, economic development, social welfare, and energy security. At the state level, the decision to ratify was influenced by the ideas of experts and scholars advocating for science-based policies, aligning China's climate policy with its image as a global leader in addressing climate challenges.

Keywords: *China, Cognitivism, Foreign Policy, Paris Agreement*

